

MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEMUNGKINAN KECURANGAN DALAM PELAPORAN KEUANGAN

**(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2008 - 2012)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

GREGORIUS SATRIO WICAKSONO
NIM. 12030111130107

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Gregorius Satrio Wicaksono
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130107
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KEMUNGKINAN KECURANGAN
DALAM PELAPORAN KEUANGAN**
Dosen Pembimbing : Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.

Semarang, 2 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

(Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 1967 0809 199203 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Gregorius Satrio Wicaksono
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130107
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KEMUNGKINAN KECURANGAN
DALAM PELAPORAN KEUANGAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Agustus 2015

Tim Penguji:

1. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. (.....)
2. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Gregorius Satrio Wicaksono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Mekanisme *Corporate Governance* dan Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 2 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

(Gregorius Satrio Wicaksono)

NIM 12030111130107

ABSTRACTS

This study aims to obtain empirical evidence and to analyze the effect of corporate governance's mechanism such as board size of commissioners, board composition of independent commissioners, audit committee, and internal audit effectiveness on likelihood of fraudulent financial reporting. Company size and leverage used as control variables in this study.

The population in this study was non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008 to 2012. Total sample used in this study was 38 companies, consist of 19 companies which did fraudulent financial reporting, and 19 companies which didn't fraudulent financial reporting as matched companies by the criteria on the same of industry and total asset. Data analysis was performed with the descriptive statistic analysis, multikolonieritas test, and hypothesis test with logistic regression analysis.

The results of analysis this study indicate that audit committee and internal audit effectiveness in a significant negative effect on likelihood of fraudulent financial reporting, while board size of commissioners and board composition of independent commissioners have no significant effect on likelihood of fraudulent financial reporting.

Keywords: fraudulent financial reporting, corporate governance, board size of commisioners, board composition of independent commissioners, audit committee, internal audit effectiveness, company size, and leverage.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, dan efektivitas audit internal terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dan *leverage* digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 - 2012. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 perusahaan yang terdiri dari 19 perusahaan yang melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan 19 perusahaan yang tidak melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan sebagai perusahaan kontrol dengan kriteria pada kesamaan dalam industri dan jumlah asetnya. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, uji multikolonieritas, dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistik.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan efektivitas audit internal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sedangkan ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Kata kunci: kecurangan dalam pelaporan keuangan, *corporate governance*, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, efektivitas audit internal, ukuran perusahaan, dan *leverage*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat, anugerah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Mekanisme Corporate Governance dan Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 - 2012)* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan Program Sarjana (S1).
2. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengertian, saran, nasihat, bimbingan, dan motivasi yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Prof. Dr. Muchamad Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.

5. Fuad, S.E.T, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dosen Wali yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan motivasi yang membangun bagi penulis.
6. Andrian Budi Prasetyo, SE, M.Si, Akt., yang telah meluangkan waktu untuk membantu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan topik dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar dan segenap staf Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang membantu penulis dalam menuntut ilmu selama perkuliahan.
8. Orang tua tercinta, Ayahnda Yohanes Subagyo, S.H. dan Ibunda Fransisca Rinawati, S.Pd., M.Pd., terima kasih untuk kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dukungan, nasihat, motivasi, dan doa yang tidak pernah berhenti. Semoga selalu dalam berkat dan lindungan dari Tuhan.
9. Eyangku Caecilia Sukartini, adikku Katarina Wahyu Natalia, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis.
10. Sahabat-sahabatku Geng Badung (Bayu, Omesh, Rusdan, Lia, Ameng) yang telah memberi warna, kebahagiaan, dan keceriaan selama menjalani masa perkuliahan.
11. Sahabat-sahabatku Cah Kontrakan “Bukan Sapari Boys” (Alex, Hermas, Bani, Nanang, dkk) dan Cah Kos (Reza Aul, Fafa, Bambo, Sulam) yang selalu menerima penulis dengan pintu terbuka ketika membutuhkan tempat berteduh dan beristirahat.
12. Sahabat-sahabatku Cah *Kongkow* (Ongry, Yuda, Tokek, Ajun, Ucup, Deon, Billy, Jejhe, Edob, Ian, Edo, Sindhu, Bayu Ambon) yang selalu hadir di saat

jenuh melanda, berbagi cerita, keceriaan, canda tawa, suka dan duka dalam menjalani kehidupan yang susah ini meskipun berbeda angkatan yang terlalu jauh.

13. Keluarga Eks Kolese Loyola (Felis, Lili, Anton, Sando, dkk), terima kasih atas semangat, dukungan, bantuan, kenangan, dan doa yang telah diberikan bagi penulis.
14. Keluarga KKN Tim II Desa Jlegong, Temanggung (Rangga, Winda, Fany, Heppy, Ari, Harris, Igun, Sachi) yang telah memberikan kenangan selama menjalani kehidupan merantau.
15. PRMK FEB UNDIP 2011 (Meiga, Titis, Winarti, Nita, Upik, Karina, Anya, Nicodemus, Shindy, Ivan, Herdian, Ricky, dkk), terima kasih atas semangat, dukungan, dan doa yang telah diberikan bagi penulis.
16. Keluarga Besar PRMK FEB UNDIP, tetap semangat dalam pelayanan demi kebesaran dan kemuliaan Tuhan.
17. Partner kerja KAP Yulianti & Rekan, terima kasih atas pengalaman dan pelajaran berharga yang diberikan kepada penulis selama magang. Tetap semangat dalam bekerja dan semoga sukses.
18. Teman bimbingan dan seperjuangan (Shinta, Redita, Ismah, Najib, Atikah, Annisa IU, Rafika, Chandra Ayu), terima kasih atas berbagai informasi, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan bagi penulis.
19. Teman-teman Akuntansi Undip 2011 yang berjuang bersama dari awal hingga akhir masa perkuliahan ini. *See you on top, guys!*

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan akan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan masukan bagi penulis di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 2 Agustus 2015
Penulis,

Gregorius Satrio Wicaksono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Engkau lihat, akhirnya ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bagaimanapun ini bukan urusan antara engkau dan mereka."

-Bunda Teresa

"Cobalah untuk tidak menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai."

-Albert Einstein

"Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa."

-Alkitab (Roma 12:12)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahnda, Ibunda, Adik, Keluarga besar saya, dan orang-orang yang saya cintai,

serta seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 2011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	14
2.1.2.1 Konsep <i>Corporate Governance</i>	14

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.1.2.4 Dewan Komisaris	19
2.1.2.5 Dewan Komisaris Independen	20
2.1.2.6 Komite Audit	21
2.1.2.7 Audit Internal	23
2.1.3 Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan (<i>Fraudulent Financial Reporting</i>)	24
2.1.3.1 Konsep <i>Fraud</i>	24
2.1.3.2 <i>Fraud Tree</i>	25
2.1.3.3 Teori <i>Fraud Triangle</i>	26
2.1.3.4 Konsep Kecurangan Pelaporan Keuangan	28
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	33
2.4 Perumusan Hipotesis	33
2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	33
2.4.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	35
2.4.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	36
2.4.4 Pengaruh Efektivitas Audit Internal terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	40
3.1.1 Variabel Dependen	40
3.1.2 Variabel Independen	40
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris	40
3.1.2.2 Komposisi Dewan Komisaris Independen	41
3.1.2.3 Komite Audit	41
3.1.2.4 Efektivitas Audit Internal	42
3.1.3 Variabel Kontrol	42
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>)	42
3.1.3.2 Leverage	43
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Metode Pengumpulan Data	45
3.5 Metode Analisis.....	45
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	45
3.5.2 Uji Multikolonieritas	46
3.5.3 Uji Regresi Logistik	47
3.5.3.1 Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of fit test</i>).....	48
3.5.3.2 <i>Omnibus Test (Overall Test)</i>	48
3.5.3.3 Koefisien Determinasi	49
3.5.3.4 Matrik Klasifikasi	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	51
4.1.1 Deskripsi Sampel Penelitian	51
4.1.2 Sampel Berdasarkan Tahun	52
4.1.3 Sampel Berdasarkan Jenis Industri	53
4.2 Analisis Data	54
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	54
4.2.2 Uji Multikolonieritas	59
4.2.3 <i>Goodness of fit test</i>	60
4.2.4 <i>Omnibus test (Overall test)</i>	61
4.2.5 Koefisien Determinasi	63
4.2.6 Matrik Klasifikasi	63
4.2.7 Uji Regresi Logistik	64
4.2.8 Pengujian Hipotesis	66
4.2.8.1 Hipotesis Pertama (H_1)	66
4.2.8.2 Hipotesis Kedua (H_2)	67
4.2.8.3 Hipotesis Ketiga (H_3)	67
4.2.8.4 Hipotesis Keempat (H_4)	67
4.2.8.5 Pengaruh Kontrol Ukuran Perusahaan terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	68
4.2.8.6 Pengaruh Kontrol Leverage terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	68
4.3 Hasil Pembahasan	69

4.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	69
4.3.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	71
4.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	72
4.3.4 Pengaruh Efektivitas Audit Internal terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan	74
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Keterbatasan	78
5.3 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Perincian Jumlah Sampel	52
Tabel 4.2 Sampel Berdasarkan Tahun	53
Tabel 4.3 Sampel Berdasarkan Industri	54
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel <i>Fraud</i>	55
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Ukuran Dewan Komisaris	55
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Dewan Komisaris Independen	56
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Jumlah Rapat Komite Audit	57
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Pengungkapan Audit Internal	57
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Ukuran Perusahaan	58
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Leverage	59
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.12 <i>Hosmer Lameshow Test</i>	61
Tabel 4.13 Perubahan Nilai -2 LL	62
Tabel 4.14 <i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>	62
Tabel 4.15 Nilai R_2	63
Tabel 4.16 Matrik Klasifikasi	64
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Logistik	65
Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	33
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hasil Statistika	83
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mempublikasikan laporan keuangan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pemakai laporan keuangan. Dalam PSAK no. 1, laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan dapat menjadi tolak ukur bagi pihak internal maupun eksternal untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat juga dijadikan sebagai pedoman bagi pemakai laporan keuangan eksternal perusahaan seperti investor, sebagai dasar pengambilan keputusan (Ghozali dan Chariri, 2007). Adanya penilaian kinerja tersebut mendorong pihak manajemen menjalankan aktivitas operasional perusahaan secara maksimal, sehingga dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat. Namun, usaha yang dilakukan pihak manajemen cenderung mengarah pada tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan

(*fraudulent financial reporting*). Hal ini menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan bagi para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan (Perols dan Barbara, 2011).

Kecurangan pelaporan keuangan merupakan penyajian dan pengungkapan secara sengaja yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mencurangi para pemakai laporan keuangan. Meningkatnya kecurangan pelaporan keuangan di perusahaan-perusahaan publik, telah meningkatkan pula kekhawatiran para pemakai laporan keuangan seperti auditor, investor, kreditor dan pengguna lainnya. Runtuhnya perusahaan-perusahaan internasional seperti World Com., Enron, dan Global Crossing karena insiden kecurangan pelaporan keuangan, telah mengikis kepercayaan terhadap pasar keuangan, informasi keuangan, dan juga profesi akuntansi seluruh dunia (Law, 2011).

Fenomena skandal keuangan di Indonesia juga merusak kepercayaan antara manajemen dengan investor. Kasus PT Kimia Farma (2001), PT Bank Lippo (2003), PT Indofarma (2004), dan PT Sari Husada (2005), merupakan contoh perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Bapepam menilai manajemen PT Kimia Farma terbukti menggelembungkan laba bersih sebesar Rp 32,6 milyar. Laba bersih tersebut seharusnya ditulis senilai Rp 99,56 milyar, namun dalam laporan keuangan tertulis senilai Rp 132,16 milyar (Bapepam, 2002).

Melihat peristiwa yang telah terjadi, penelitian mengenai kecurangan pelaporan keuangan menarik untuk diteliti. Di era modernisasi ini, negara-negara

di dunia perlu menerapkan suatu sistem yang harus dikelola dengan baik, yang sering disebut pula dengan *Good Corporate Governance*. Dengan adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik, maka suatu negara diharapkan dapat mengatasi krisis keuangan maupun non keuangan yang akan terjadi. Seiring dengan berkembangnya pula isu *corporate governance*, maka sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola bisnis suatu perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Persoalan mengenai *corporate governance* di Indonesia pertama kali dimulai tahun 1998. Pada tahun tersebut terjadi krisis moneter secara global sehingga menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) pada tahun 1999 menyimpulkan ada beberapa faktor penyebab krisis keuangan yang terjadi di Asia, termasuk Indonesia, yaitu (1) dewan komisaris dan dewan direksi yang tidak efektif, (2) adanya kebocoran dalam pengendalian internal perusahaan, (3) tidak menyajikan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan perusahaan, (4) laporan keuangan perusahaan disajikan secara tidak wajar dan kurang patuhnya terhadap kebijakan organisasi. Lemahnya sistem tata kelola perusahaan di Indonesia pada waktu itu, menyebabkan beberapa perusahaan melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksir konsep *Good Corporate Governance* sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Khairandy

dan Malik, 2007). *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Khairandy dan Malik (2007), *corporate governance* mengacu pada suatu prosedur yang dibuat dalam perusahaan yang memberikan tentang fakta-fakta material keadaan investor dan *stakeholder* lain dan membuat keputusan yang efisien dan akurat dalam perusahaan. Dengan kata lain, *corporate governance* di sini menggambarkan tentang serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban direksi, *officer*, dan pemegang saham.

Effendi (2009) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. *Good corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri dan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital

yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (El Gammal dan Showeiry, 2012).

Berdasarkan definisi dari *corporate governance* tersebut, maka peran tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya *fraud* seperti yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas dari *corporate governance* perlu ditingkatkan agar manajer tidak melakukan penyimpangan terhadap para pemangku kepentingan. Menurut Razali dan Arshad (2014), ada beberapa indikator dalam mengukur kualitas *corporate governance* antara lain: (1) ukuran dewan komisaris, (2) komposisi dewan komisaris independen, (3) komite audit, dan (4) efektivitas audit internal.

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam implementasi *good corporate governance*. Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Oleh karena itu, dengan jumlah dewan komisaris yang semakin banyak dalam suatu perusahaan maka pengendalian internal perusahaan tersebut akan semakin baik.

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris dan merupakan individu-individu di luar organisasi. Dewan komisaris independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan

keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou, 2001). Artinya, semakin independen dewan komisaris maka akan semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Komite audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan pandangan tentang permasalahan akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Egon, 2000). Tugas komite audit membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen dalam upaya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Audit internal memiliki peran penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit internal harus bersifat objektif dan independen dalam melaksanakan kegiatan audit untuk tercapainya tujuan pengendalian internal. Menurut Belay (2007), fungsi audit internal merupakan salah satu mekanisme yang paling kuat dalam pemantauan dan mempromosikan sistem pemerintahan yang baik dalam suatu organisasi.

Razali dan Arshad (2014) menguji hubungan antara struktur *corporate governance* dan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif secara signifikan antara komite audit, efektivitas audit internal, dan dewan komisaris independen terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Namun, ukuran dewan komisaris dan anggota dewan yang berpengalaman internasional tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan komite audit terhadap manajemen laba. Namun, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini berbeda dengan Murhadi (2009) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Chtourou (2001) dan Skousen *et al.* (2009) menemukan bahwa komite audit berhubungan negatif secara signifikan dengan terjadinya kecurangan dan praktik manajemen laba. Berbeda dengan Murhadi (2009) yang menemukan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang artinya keberadaan komite audit belum mampu mengurangi manajemen laba dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk memperkuat penelitian terdahulu mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel *corporate governance* dalam penelitian ini terdiri dari ukuran

dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, dan efektivitas audit internal. Namun karena ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* seperti ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage*, maka kedua faktor tersebut akan dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat fenomena skandal keuangan yang telah terjadi di Indonesia, maka perusahaan-perusahaan perlu menerapkan suatu sistem yang harus dikelola dengan baik, yang sering disebut pula dengan *Good Corporate Governance*. Seiring dengan berkembangnya pula isu *corporate governance*, maka sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola bisnis suatu perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. *Good corporate governance* sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas dari *corporate governance* perlu ditingkatkan agar manajer tidak melakukan penyimpangan dari pemangku kepentingan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka penulis tertarik melakukan penelitian kembali mengenai mekanisme *corporate governance* dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, dan efektivitas audit internal terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Oleh

karena itu, penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan?
4. Bagaimana pengaruh efektivitas audit internal terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas audit internal terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan dapat menjadi bahan literatur untuk menambah wawasan dalam bidang studi akuntansi yang membahas mengenai mekanisme *corporate governance* dan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar lebih memahami mekanisme *corporate governance* dalam mencegah dan menghalangi kecurangan dalam pelaporan keuangan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendukung penelitian, kajian-kajian mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil analisis tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat membangun penelitian ini serta memberi solusi mengenai permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan dasar pemikiran dalam memahami konsep *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri karena pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*.

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa konflik ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan antara investor dengan manajer. Investor menginginkan *return* yang besar atas investasi yang mereka tanamkan di perusahaan, sedangkan manajer menginginkan kompensasi yang besar pula atas usaha yang mereka lakukan demi kelangsungan perusahaan. Investor menilai kinerja manajemen berdasarkan dari laba yang dihasilkan perusahaan, sedangkan manajer berupaya memenuhi tuntutan investor dengan memaksimalkan laba perusahaan agar dapat memperoleh kompensasi yang besar.

Menurut Eisenhardt (1989), *agency theory* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa hubungan antara investor dan manajer yang seperti ini dapat menyebabkan suatu kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*). Kondisi ini terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan informasi yang diterima oleh investor sehingga hal itu akan mendorong perilaku manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi dari investor. Dalam kondisi ketidakseimbangan informasi tersebut, manajer berkesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dengan memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan yang disajikan kepada investor (Richardson, 1998).

Dengan adanya konflik kepentingan dan kondisi ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent*, maka akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang ditanggung oleh perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap *agent*. Hampir tidak mungkin

bagi *principal* memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer untuk mengambil keputusan yang optimal seperti yang diharapkan *principal* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Cara yang ideal untuk mengawasi kinerja manajemen yaitu dengan *corporate governance*. Karena perilaku manajer yang tidak transparan dalam pelaporan keuangan ini, bertentangan dengan prinsip *good corporate governance* yang salah satunya adalah keterbukaan (*transparancy*).

Widowati (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan *corporate governance* dapat dijadikan alat manajer (*agent*) untuk meyakinkan investor (*principal*) dalam memastikan penerimaan *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* diharapkan mampu mengatasi konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent* untuk mencegah dan menghalangi terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

2.1.2. Corporate Governance

2.1.2.1. Konsep Corporate Governance

Menurut *Cadbury Committee* (1992), *Corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban

kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Turnbul Report di Inggris (1999) dalam Effendi (2009), mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Pengertian lain dari *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola risiko, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*. Peran tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya *fraud*, sebaliknya tata kelola perusahaan

yang baik dapat memberikan kontribusi dalam usaha pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

2.1.2.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004, menetapkan prinsip-prinsip yang diharapkan perusahaan menerapkan di setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. KNKG menyebut prinsip *corporate governance* sebagai asas *corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang didisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas**, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. **Responsibilitas**, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan kesetaraan suatu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.2.3. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan bagi para pemegang saham. Menurut Siswanto Sutojo dan John Aldridge (2005), *good corporate governance* mempunyai tujuan utama:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan

Manfaat corporate governance menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) adalah:

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam rangka memperkuat posisi perusahaan kompetitif baik domestik maupun internasional, dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mendukung investasi.
2. Untuk mendorong manajemen perusahaan untuk berperilaku secara profesional, transparan, dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS.
3. Untuk mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi untuk membuat keputusan dan untuk bertindak dengan rasa moralitas yang ketat, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum, dan sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap berbagai stakeholder dan perlindungan lingkungan.

Dari tujuan dan manfaat tersebut maka perusahaan yang melaksanakan dan menerapkan *good corporate governance* akan melindungi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan perusahaanpun dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

2.1.2.4. Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam implementasi *good corporate governance*. Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga investor tetap memiliki kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perusahaan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 menjelaskan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada direksi. Menurut FCGI, tugas dari dewan komisaris antara lain:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan Governance, dan mengadakan perubahan jika perlu.

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

2.1.2.5. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Emirzon, 2007). Dewan komisaris independen diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komposisi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Beasley (1996) dalam Nasution dan Setyawan (2007) menyatakan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Tugas dewan komisaris independen yaitu memastikan prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, tugas-tugas tersebut antara lain:

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.

4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

2.1.2.6. Komite Audit

Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Dalam peraturan Kep. 29/PM/2004, perusahaan diwajibkan membentuk komite audit yang memiliki tugas, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
3. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
4. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mengadakan rapat audit yang berfungsi sebagai media komunikasi antar anggotanya dalam menerapkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan. Semakin sering komite audit melakukan rapat, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antar anggota komite audit dalam melakukan fungsi pengawasannya.

Prosedur rapat yang diadakan oleh komite audit telah diatur dalam keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang isinya adalah:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2.1.2.7. Audit Internal

Menurut Valery G. Kumat (2011), audit internal adalah agen yang paling tepat untuk mewujudkan *internal control*, *risk management* dan *good corporate governance* yang pastinya akan memberi nilai tambah bagi sumber daya dan perusahaan. Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif kepada mereka mengenai hal-hal yang diperiksa (Hery, 2010).

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008), audit internal memiliki peran ideal dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Audit internal dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya *fraud*, yang mencakup:

1. Identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.
2. Penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian.

Audit internal bertanggung jawab membantu manajemen dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya *fraud* dengan melakukan pengujian keandalan dan efektivitas dari pengendalian dalam berbagai segmen di suatu perusahaan. Namun, audit internal juga harus mendapat sumber daya yang memadai dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

2.1.3. Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*)

2.1.3.1. Konsep *Fraud*

Pada dasarnya *fraud* merupakan tindakan ketidakjujuran yang melanggar hukum dan bisa merugikan berbagai pihak. Menurut BPK RI (2007), *fraud* adalah salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Ernst & Young (2009), mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. *Fraud* merupakan kesengajaan dalam menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit (SAS no. 99).

Dengan luasnya konsep dan pengertian *fraud* tersebut, maka dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Menurut Binbangkum (n.d.) secara umum, unsur-unsur dari kecurangan adalah:

1. Terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*)
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
3. Fakta bersifat material (*material fact*)
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*)

5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
6. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*)
7. Yang merugikannya (*detriment*).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa *fraud* artinya suatu item yang tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila suatu kesalahan disengaja, maka kesalahan tersebut merupakan *fraud*. *Fraud* merupakan sesuatu yang sangat sulit diberantas karena dilakukan dengan sistematis sehingga diperlukan pula penanganan yang sistematis. Akan tetapi, *fraud* bisa dicegah atau setidaknya bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian anti *fraud*.

2.1.3.2. *Fraud Tree*

ACFE membagi kecurangan (*fraud*) dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. *Asset Misappropriation*

Asset Misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset/harta perusahaan atau pihak lain. Jenis ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah terdeteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. *Fraudulent Statement*

Fraudulent Statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi

keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

3. *Corruption*

Yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*symbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

2.1.3.3. Teori *Fraud Triangle*

Teori *fraud triangle* pertama kali diciptakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Kemudian teori ini diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS no. 99, *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. *Fraud triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* (Turner *et al.*, 2003).

1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan penyebab seseorang yang melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non keuangan. Dalam hal keuangan sebagai contoh dorongan untuk memiliki barang-barang yang

bersifat materi. Tekanan dalam hal non keuangan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, misalnya tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Menurut SAS no. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan individu, dan target keuangan.

2. *Opportunity* (Peluang)

Peluang merupakan penyebab yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Para pelaku *fraud* percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik, dan atau melalui penggunaan posisi. Kegagalan untuk menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi aktivitas *fraud* juga meningkatkan kesempatan terjadinya kecurangan. Dari tiga elemen dalam *fraud triangle*, kesempatan memiliki kontrol yang paling atas. Organisasi perlu untuk membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol membuat karyawan dalam posisi tidak dapat melakukan *fraud* dan yang efektif dapat mendeteksi aktivitas kecurangan jika hal itu terjadi.

Menurut SAS no. 99, dikatakan bahwa peluang pada *kecurangan* dalam lamporan keuangan dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan struktur organisasional.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi merupakan unsur penting penyebab terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari fraud triangle yang paling sulit diukur (Skousen *et al.*, 2009). Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan. Bagi mereka dengan standar moral yang lebih tinggi, itu mungkin tidak begitu mudah. Pelaku fraud selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya.

Menurut SAS no. 99, rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan tersebut serta keadaan total akrual dibagi dengan total aktiva.

2.1.3.4. Konsep Kecurangan Pelaporan Keuangan

Kecurangan pelaporan keuangan adalah salah satu jenis penipuan dengan dampak negatif secara substansial, hilangnya kepercayaan investor, kerusakan reputasi, denda potensial dan tindakan kriminal (Ernst and Young, 2009). Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

Menurut SAS no. 99, kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.
2. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
3. Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Gravitt (2006) dalam Nguyen (2008) menjelaskan bahwa kecurangan pada laporan keuangan melibatkan skema seperti berikut:

1. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan yang material, dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Kelalaian yang disengaja atau misrepresentasi peristiwa, transaksi, rekening, atau informasi penting lainnya dari laporan keuangan yang disusun.
3. Kesalahan yang disengaja pada penggunaan prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, pengakuan, laporan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
4. Kelalaian yang disengaja pada pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai berdasarkan prinsip akuntansi dan kebijakan dan nilai keuangan yang terkait.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *corporate governance* dan kecurangan pelaporan keuangan telah banyak dilakukan. Nasution dan Setiawan (2007) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Sampel diambil dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2000-2004. Manajemen laba diproksikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model akrual khusus Beaver dan Engel (1996). Hasil dari penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan komite audit terhadap manajemen laba. Namun, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Skousen *et al.* (2009) melakukan pendeteksian *fraud* dengan menggunakan analisis *fraud triangle*. Tujuan penelitian tersebut untuk menguji efektivitas teori Cressey (1953) mengenai kerangka faktor risiko kecurangan yang diterapkan dalam SAS No.99 dalam mendeteksi *financial statement fraud*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham eksternal dan internal serta kontrol dewan direksi berpengaruh terhadap peningkatan *financial statement fraud*. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa ekspansi jumlah anggota independen di komite audit berhubungan negatif dengan terjadinya kecurangan.

Penelitian lain oleh Razali dan Arshad (2014) bertujuan untuk menguji hubungan antara struktur *corporate governance* dan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian ini diuji berdasarkan analisis laporan tahunan dari

227 Perusahaan yang terdaftar di Malaysia pada tahun 2010-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif secara signifikan antara komite audit, efektivitas audit internal, dan dewan komisaris independen terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Namun, ukuran dewan komisaris dan anggota dewan yang berpengalaman internasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Temuan ini memberikan bukti bahwa efektivitas struktur *corporate governance* dapat mengurangi kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chtourou (2001)	<i>Corporate Governance and Earning Management</i>	-Variabel Independen: karakteristik komite audit, karakteristik dewan komisaris. -Variabel Dependen: discretionary accrual -Variabel Kontrol : ukuran perusahaan, <i>leverage</i>	1.Komisaris independen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap manajemen laba. 2.Komite audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap manajemen laba
2.	Nasution dan Setiawan (2007)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia	-Variabel Independen: komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan. -Variabel Dependen: manajemen laba	1.Komposisi dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 2.Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba 3.Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

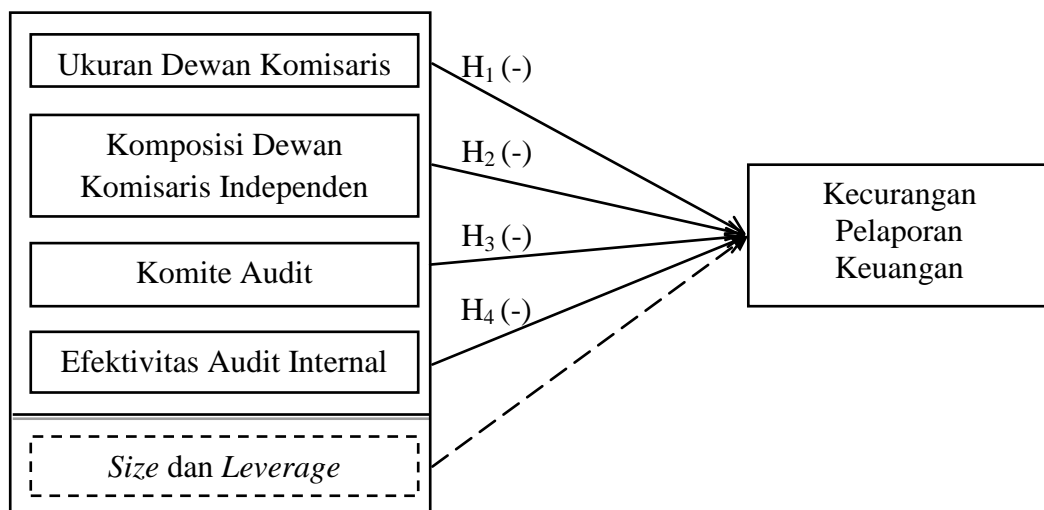
3.	Murhadi (2009)	Studi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Praktik Earnings Management pada Perusahaan Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia	-Variabel Independen: keberadaan komite audit, dualitas CEO, keberadaan komisaris independen, top share, koalisi pemegang saham. -Variabel Dependen: manajemen laba -Variabel Kontrol: ukuran perusahaan, <i>leverage</i>	1.Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2.Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 3.Top share berpengaruh secara signifikan positif terhadap manajemen laba.
4.	Skousen et al. (2009)	<i>Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99</i>	-Variabel Independen: <i>Financial stability, personal financial need and ineffective monitoring</i> -Variabel Dependen: <i>Financial Statement Fraud</i>	1.Pertumbuhan aset yang cepat, peningkatan kebutuhan uang tunai dan pembiayaan eksternal yang secara positif berkaitan dengan kemungkinan terjadinya <i>fraud</i> . 2.Kepemilikan saham eksternal dan internal serta kontrol dewan direksi berpengaruh terhadap peningkatan <i>financial statement fraud</i> . 3.Ekspansi jumlah anggota independen di komite audit berhubungan negatif dengan terjadinya kecurangan.
5.	Razali dan Arshad (2014)	<i>Disclosure of corporate governance structure and the likelihood of fraudulent financial reporting</i>	Variabel Independen: <i>board size</i> , anggota dewan dengan pengalaman internasional, komite audit, audit internal, dewan komisaris independen -Variabel Dependen: <i>fraudulent financial reporting</i> -Variabel Kontrol: <i>size dan leverage</i>	1.Komite audit, audit internal, dan dewan komisaris independen berhubungan negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. 2.Ukuran dewan komisaris dan anggota dewan yang berpengalaman internasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Sumber: Diolah dari berbagai literatur

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* sebagai variabel independen yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit dan efektivitas audit internal terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan sebagai variabel dependen.

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan

Dalam teori agensi, Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan antara

agent dengan *principal*. Pendelegasian tugas dari *principal* kepada *agent* membuat *principal* tidak dapat mengawasi kinerja manajer secara menyeluruh, sehingga tercipta suatu kondisi asimetri informasi yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*.

Oleh karena itu, dewan komisaris dibentuk untuk ditugaskan dan diberi tanggung atas jawab pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance* dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam implementasi *good corporate governance*. Dalam konteks informasi keuangan, mereka bertanggung jawab atas transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Fama dan Jensen (1983) yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan karena mereka memiliki tingkat pengendalian tertinggi dalam suatu organisasi.

Vafeas (2005) berpendapat bahwa ukuran dewan terlalu kecil dan terlalu besar tidak efektif. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa tanggung jawab kurang diambil oleh ukuran dewan yang besar dan terlalu banyak kewajiban untuk ukuran dewan yang kecil. Hasil penelitian Nasution dan Setyawan (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Abbot, Taman, dan Parker (2000) dalam Razali dan

Arshad (2014) menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran dewan dan pemantauan kualitas pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

2.4.2. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan

Secara umum, dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris dan merupakan individu-individu di luar organisasi. Komposisi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Menurut Siladi (2006), meskipun pada kenyataannya dewan komisaris independen tidak terlibat dalam kegiatan operasi sehari-hari, namun mereka masih perlu bekerja sama dengan dewan direksi untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang perusahaan. Sebagai dewan komisaris independen, mereka tidak mengalami tekanan oleh organisasi internal perusahaan meskipun tidak terlibat dalam kegiatan operasi sehari-harinya. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk bertindak secara independen dan sebagai pemisah kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Penelitian yang dilakukan oleh Chtourou (2001), Nasution dan Setiawan (2007), serta Razali dan Arshad (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris

independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka dapat menjamin transparansi laporan keuangan sehingga pemegang saham mendapatkan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

2.4.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan

Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri karena pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan permasalahan yang sering disebut dengan *agency problem* (Jensen dan Meckling, 1976). Penerapan mekanisme *corporate governance*, yang salah satunya adalah komite audit, merupakan salah satu cara untuk mengatasi terjadinya *agency problem*. Dengan adanya komite audit diharapkan tidak terjadi *fraud* dan menyeimbangkan informasi yang diperoleh *principal* dan *agent*.

Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tugas komite audit membantu dewan komisaris

untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen dalam upaya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Komite audit mempunyai tanggung jawab utama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, pengawasan internal, menelaah sistem pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Bapepam (2004) mensyaratkan komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh dewan komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Selain itu, Bapepam juga menghimbau bahwa setidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan. Oleh karena itu, semakin sering komite audit melakukan rapat, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antar anggota komite audit dalam melakukan fungsi pengawasannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Chtourou (2001) dan Skousen *et al.* (2009) menemukan bahwa komite audit berhubungan negatif dengan terjadinya kecurangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H₃: Komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

2.4.4. Pengaruh Efektivitas Audit Internal terhadap Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan

Audit internal memiliki peran penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa (Hery, 2010). Menurut Belay (2007), fungsi audit internal merupakan salah satu mekanisme yang paling kuat dalam pemantauan dan mempromosikan sistem pemerintahan yang baik dalam suatu organisasi.

Audit internal bertanggung jawab membantu manajemen dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya *fraud* dengan melakukan pengujian keandalan dan efektivitas dari pengendalian dalam berbagai segmen di suatu perusahaan. Namun, audit internal juga harus mendapat sumber daya yang memadai dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2005) dan Archambeault (2002) dalam Razali dan Arshad (2014) menemukan bahwa audit internal akan memberikan keuntungan tambahan bagi suatu perusahaan karena auditor internal sudah memiliki pengetahuan tentang perusahaan tersebut. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi gejala *fraud* setiap kali ada potensi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₄: Efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang dikategorikan menjadi dua, yaitu kode 1 (satu) untuk perusahaan-perusahaan yang terbukti telah melakukan kecurangan (*fraud*) karena melakukan sejumlah pelanggaran terhadap peraturan Bapepam yang mengandung unsur *fraud* serta terkena sanksi dan kode 0 (nol) untuk perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kecurangan (*non fraud*).

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, dan efektivitas audit internal.

3.1.2.1. Ukuran Dewan Komisaris

Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Dengan jumlah anggota dewan komisaris yang

semakin banyak, maka pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen suatu perusahaan dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*. Variabel ini diukur dengan jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan.

3.1.2.2. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan dengan manajemen perusahaan. Beasley (1996) dalam Nasution dan Setyawan (2007) menyatakan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.. Komposisi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Variabel ini diukur dengan menggunakan persentase dewan komisaris dari luar perusahaan terhadap total jumlah dewan komisaris.

3.1.2.3. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Menurut keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3

(tiga) bulan. Variabel ini diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit yang terdapat pada perusahaan dalam satu tahun.

3.1.2.4. Efektivitas Audit Internal

Audit Internal memiliki peran penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Belay (2007), fungsi audit internal merupakan salah satu mekanisme yang paling kuat dalam pemantauan dan mempromosikan sistem pemerintahan yang baik dalam suatu organisasi. Variabel ini diukur dengan memberi kode 1 jika audit internal dalam laporan keuangan diungkapkan, kode 2 jika diungkapkan namun tidak lengkap, kode 3 jika tidak diungkapkan.

3.1.3. Variabel Kontrol

Variabel Kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage*.

3.1.3.1. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki informasi lebih banyak daripada perusahaan dengan ukuran yang kecil, karena perusahaan besar cenderung lebih diamati baik oleh media masa dan analisis, sehingga semakin besar ukuran perusahaan diharapkan semakin berkurangnya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Variabel ini diukur dengan menggunakan nilai log total aset perusahaan pada akhir tahun.

3.1.3.2. *Leverage*

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi sebagai akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan kecurangan karena perusahaan terancam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya. Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total aset.

3.2. **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 - 2012. Perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan sengaja tidak dimasukkan ke dalam sampel karena regulasi penyajian laporan keuangannya berbeda dengan sektor non keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Perbedaan tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan hasil penelitian tidak *valid*.

Sedangkan sampel yang merupakan bagian dari populasi diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diharapkan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel untuk penelitian adalah:

1. Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang non keuangan yang terdaftar di BEI dalam periode tahun 2008 - 2012.

2. Untuk perusahaan yang dikategorikan *fraud* menggunakan data laporan dari OJK dengan kategori peringatan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, yaitu perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan Bapepam, serta terkena sanksi dan pelanggaran tersebut mengandung unsur *fraud*.
3. Perusahaan yang dikategorikan *non fraud* yang dijadikan perusahaan kontrol harus memiliki kesamaan pada industri, jumlah aset, dan tanggal tutup buku pada tahun *fraud*.
4. Perusahaan memiliki komite audit serta melaporkan karakteristik pertemuan komite audit pada tahun *fraud* dan memiliki data yang lengkap pada tahun 2008 - 2012.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, telah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi, berupa data-data variabel bebas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan tahunan perusahaan. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini karena mudah diperoleh, tidak memerlukan biaya yang tinggi serta data yang diperoleh lebih akurat dan valid karena laporan keuangan yang dipublikasikan telah diaudit oleh akuntan publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan yang dikeluarkan OJK, www.idx.co.id, pojok BEI (Bursa Efek Indonesia)

Universitas Diponegoro, website perusahaan dan *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* dari tahun 2008 - 2012.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dari laporan yang dikeluarkan OJK, *www.idx.co.id*, pojok BEI (Bursa Efek Indonesia) Universitas Diponegoro, website perusahaan, dan *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* dari tahun 2008 - 2012. Metode studi pustaka dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur seperti jurnal-jurnal penelitian, artikel penelitian terdahulu, *internet research*, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat persebaran data variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai maksimum, nilai minimum, *mean*, dan deviasi standar.

Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan. *Mean* digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Deviasi standar digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.5.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi, salah satunya dapat dilihat dengan menganalisis matrik korelasi pada variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terjadi korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal tersebut menjadi indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011).

3.5.3. Uji Regresi Logistik

Metode yang digunakan penelitian ini adalah uji regresi logistik. Regresi logistik digunakan karena variabel independen dapat dihandel secara mudah dimana pada analisis diskriminan penggunaan variabel *dummy* menimbulkan masalah dengan kesamaan *variance* atau *covariance*. Model regresi ini dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{FRAUD} = \alpha + \beta_1 \text{COM} + \beta_2 \text{COMINDEP} + \beta_3 \text{ACMEET} + \beta_4 \text{IA} + \beta_5 \text{SIZE} + \beta_6 \text{LEV} + \epsilon$$

Keterangan:

FRAUD : variabel *dummy*, kode 1 (satu) untuk perusahaan yang melakukan kecurangan (*fraud*) laporan keuangan, kode 0 (nol) untuk perusahaan *non fraud*

α : konstanta

β : koefisien variabel

COM : ukuran dewan komisaris

COMINDEP : dewan komisaris independen

ACMEET : komite audit

IA : efektivitas audit internal

SIZE : ukuran perusahaan

LEV : *leverage*

ϵ : koefisien *error*

Menurut Ghozali (2006) langkah-langkah yang dikerjakan dalam regresi logistik adalah sebagai berikut:

3.5.3.1. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit Test* (Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Test* untuk menguji hipotesis nol dan mendapatkan bukti bahwa data empiris yang digunakan sesuai dengan model.

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Test* signifikan atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak dan model dianggap tidak fit. Namun, jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Test* tidak signifikan atau lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis nol diterima. Artinya, model dianggap fit dan mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model sesuai dengan data observasinya.

3.5.3.2. Omnibus Test (*Overall Test*)

Pengujian ini digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara nilai $-2 \log \text{likelihood}$ pada awal (*Block Number* = 0) dengan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ pada akhir (*Block Number* = 1). Adanya penurunan antara nilai $-2 \log \text{likelihood}$ awal dengan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ akhir menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data observasinya.

Nilai *chi-square* dalam *omnibus test of model coefficient* merupakan penurunan nilai *-2 log likelihood*. Jika nilai *chi-square* menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan variabel independen dalam model penelitian secara simultan dapat memprediksi variabel dependen.

3.5.3.3. Koefisien Determinasi (*Cox and Snell's Square* dan *Nagelkerke's R Square*)

Cox and Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba untuk meniru ukuran *R Square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu), sehingga sulit diinterpretasikan. *Nagelkerke's R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell's R Square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell's R Square* dengan nilai maksimumnya. Nilai *Nagelkerke's R Square* dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression* (Ghozali, 2011).

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar nilai *Nagelkerke's R Square*.

3.5.3.4. Matrik Klasifikasi

Matrik klasifikasi merupakan cara menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. Matrik klasifikasi bertujuan untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari

model regresi dalam memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan *fraud*. Pada table kolom terdiri dari dua nilai prediksi variabel dependen, yaitu perusahaan *fraud* (1) dan perusahaan *non fraud* (0), sedangkan pada tabel baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Apabila model sempurna, semua kasus akan berada pada posisi diagonal dengan tingkat peramalan 100%. Jika pada model logistik terjadi homoskedastisitas, maka persentase yang benar akan sama untuk kedua baris.